

Perubahan Rencana Kerja²⁰²⁵

KECAMATAN TAMBAKSARI KOTA SURABAYA

DAFTAR ISI

BAB I	4
PENDAHULUAN	4
1.1. Maksud dan Tujuan	4
1.1.1 Maksud Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2025	4
1.1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Renja OPD	5
1.2. Landasan Hukum	5
1.2.1. Keterkaitan Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah.....	5
1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran.....	5
1.3. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II	7
EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025	7
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD	7
2.1.1 Keterkaitan antara Renstra OPD 2021-2026 dengan Perubahan Renja OPD 2022 - 2025	7
2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja OPD 2024-2025	7
Tabel 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Tambaksari sampai dengan Triwulan I Tahun 2025	9
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD.....	24
2.2.1 Analisis kondisi dan rencana tata ruang wilayah	24
2.2.2 Analisis kondisi kewilayahan dan kependudukan	24
2.2.3 Analisis terkait tugas dan fungsi pelayanan OPD	26
2.2.4 Analisis SPM/IKK/Indikator lainnya	34
2.2.5 Analisis kondisi pelayanan OPD	35
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD.....	37
2.3.1 Tingkat Kinerja OPD	38
2.3.2 Permasalahan dan Hambatan	39
2.3.3 Peluang dan Tantangan.....	39
2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan OPD.....	40
BAB III	41
RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	41
3.1. Program dan kegiatan	41
3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Kota Surabaya	41
3.1.2. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan	41
3.1.3. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan	42

BAB IV	51
PENUTUP.....	51

BAB I

PENDAHULUAN

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun 2025, dilakukan sesuai hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun 2025. Rencana Kerja Perubahan Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun 2022 yang selanjutnya adalah dokumen yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Keuangan Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun 2025. Rencana Kerja Kecamatan Tambaksari Tahun 2025 merupakan penjabaran program/ kegiatan dan Sub Kegiatan dari Renstra Kecamatan Tambaksari Tahun 2021-2026 yang mengacu pada RPJMD Kota Surabaya Tahun 2021-2026, juga sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

1.1. Maksud dan Tujuan

1.1.1 Maksud Penyusunan Perubahan Renja OPD Tahun 2025

Maksud disusunnya Perubahan Renja OPD Kecamatan Tambaksari adalah sebagai acuan pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur Kecamatan, sehingga di dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dapat terfokus, dan tidak terjadi tindakan - tindakan yang biasa.

Maksud penyusunan Perubahan Renja OPD adalah :

1. Memperbaiki arah penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas, dan untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki sesuai tugas dan fungsi Kecamatan sehingga didalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan dapat terfokus serta memaksimalkan pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surabaya
2. Memperbaiki rencana kerja satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kota Surabaya maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga pelaksanaan pelayanan publik, pembangunan, kemasyarakatan mendapatkan hasil yang kondusif dan bisa dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

1.1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Renja OPD

Tujuan disusunnya Perubahan Renja OPD Kecamatan yaitu :

1. Keselarasan tugas masing-masing unit pelaksana mewujudkan kegiatan.
2. Mewujudkan profesionalitas pegawai didalam merumuskan Tema dan Pokok tema Pemerintah Kota Surabaya.
3. Menyelaraskan program dan kegiatan pembangunan Kota Surabaya Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi Pemerintah Kota Surabaya

1.2. Landasan Hukum

1.2.1. Keterkaitan Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Berkaitan dengan tugas dan fungsi Kecamatan landasan hukum yang menjadi acuan adalah :

1. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Ssusunan Perangkat Daerah kota Surabaya.
2. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota.

1.2.2. Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Landasan hukum dalam penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Keuangan Perangkat Daerah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun 2025 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026;
9. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
10. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya;
11. Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025;
12. Keputusan Walikota Surabaya Nomor 100.3.3.3/134/436.1.2/2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

1.3. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Perubahan Renja Perubahan Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1. Maksud dan Tujuan memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perubahan Perangkat Daerah.
2. Landasan Hukum Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.
3. Sistematika Penulisan Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perubahan Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

Bab II Evaluasi Rencana Kerja sampai dengan Triwulan II Tahun 2025

Bab ini berisi mengenai evaluasi hasil Perubahan Renja Perangkat Daerah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun 2025 menggunakan evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun 2025. Hasil evaluasi realisasi DPA-Perangkat Daerah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya Tahun 2025 yang disampaikan adalah realisasi DPA sampai dengan Triwulan II Tahun 2025.

Bab III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Mengemukakan rincian rencana program dan kegiatan perangkat daerah (mencakup lokasi, target, dan pagu indikatif) saat sebelum dan setelah mengalami perubahan.

Bab IV Penutup

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN I TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD

Dalam pelaksanaan Rencana Kerja tahun 2025 Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya telah mencapai target indikator sesuai dengan Renstra 2021 – 2026. Dengan demikian pencapaian target indikator ini merupakan langkah awal untuk menuju Rencana Strategis berikutnya.

2.1.1 Keterkaitan antara Renstra OPD 2021-2026 dengan Perubahan Renja OPD 2022 - 2025

Telaah tentang Visi RPJMD pemerintah Kota Surabaya tahun 2021 – 2026 "Gotong Royong menuju Surabaya Kota Dunia yang maju, humanis dan berkelanjutan".

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Surabaya yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Surabaya tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Dari 5 (lima) misi Kepala Daerah Kota Surabaya tersebut di atas, maka kecamatan diamanahkan untuk melaksanakan misi 4.

Adapun tujuan dan sasaran dari misi 4 adalah sebagai berikut :

Misi 4, dengan tujuan terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif dan sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

2.1.2 Evaluasi Pelaksanaan Perubahan Renja OPD 2024-2025

Dari data tersebut dapat kita lihat bahwa pencapaian target dari Renstra secara keseluruhan dapat terpenuhi. Sedangkan dari Perubahan Renja 2024 s.d. 2025 dimana saat ini

masih pada triwulan I juga dapat terpenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Kecamatan Tambaksari sudah sama dengan target yang telah ditetapkan. Pencapaian realisasi program kegiatan yang disusun dalam Dokumen Rencana Kerja (Perubahan Renja) Tahun 2023 s.d. 2025 dan dilaksanakan dalam bentuk kegiatan tahunan organisasi guna menjawab visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi, pada dasarnya secara umum pencapaian tahun 2024 s.d. 2025 dapat dikatakan berhasil walaupun dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kegiatan yang pencapaian target kinerja belum maksimal. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa kendala baik secara internal maupun eksternal.

Faktor Internal :

- a. Kemampuan SDM kurang menyesuaikan arus globalisasi,
- b. Sarana dan prasarana masih kurang memadai,
- c. Keterbatasan anggaran dan dana.

Faktor Eksternal :

- a. Kurangnya dukungan partisipasi masyarakat,
- b. Mobilisasi penduduk yang cepat,
- c. Sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang bervariasi.

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Tambaksari sampai dengan Triwulan I Tahun 2025

Kode	Sasa ran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(00 0)	K	Rp.(00 0)	K	Rp.(00 0)						
1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11 1		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
7		Unsur Kewilayahan																					
7.01		Kecamatan																					
7.01.01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota		30,774,191		33,589,949		34,99 8,335		6,950 ,263		-		-		-		6,95 0,26 3		6,950 ,263		22,58%
				Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan [1387]	98.1 5 %		97.3 7 %		97.9 1 %		97.1 2 %		-		-		-		97.12 %		97.1 2 %		98.9 5%
7.01.01. 2.02			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		25,443,205				27,93 7,694		5,614 ,330		-		-		-		5,61 4,33 0		5,614 ,330		22.07%
				Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN [1218]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		200 %		200. 00 %
7.01.01. 2.02.00 01			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN [1504]		25,443,205				27.93 7.694		5.614 .330		-		-		-		5.61 4.33 0		5.614 .330		22,07%
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN [5526]	95 Ora ng/ bula n		82 Ora ng/ bula n		80 Ora ng/ bula n		76 Ora ng/ bula n		-		-		-		76 Orang /bula n		158 Ora ng/ bula n		86.3 2%
7.01.01. 2.06			Administrasi Umum Perangkat Daerah		5,098,006				6,860 ,142		1,313 ,455		-		-		-		1,31 3,45 5		1,313 ,455		25.76%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan [1220]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		200 %		200.00 %	
7.01.01.2.06.00.02						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor [2405]			5,098,006			6.860.142		1.313.455		-		-		-		1.313.455		1.313.455		25,76%	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan [5531]	20 Paket		20 Paket		20 Paket		3 Paket		-		-		-		3 Paket		23 Paket		100.00 %	
7.01.01.2.09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			232,980			200,498		22,478		-		-		-		22,478		22,478		9,65%	
							Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan [2155]	100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		-		100 %		200 %		200.00 %	
7.01.01.2.09.00.10						Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya [2407]			232,980			200.498		22,478		-		-		-		22,478		22,478		9,65%	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang	50 Unit		17 Unit		50 Unit		4 Unit		-		-		-		4 Unit		21 Unit		34.00%	

Kode	Sasa ran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(00 0)	K	Rp.(00 0)	K	Rp.(00 0)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+1 1		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
							Dipelihara/Direhabilit asi [5532]																					
7.01.02						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			9,621,020		60,273		228,2 98		32,87 4		-		-		-			32,8 74		32,87 4		0,34%
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat [1180]	100 %			100. 00 %		100 %		0.00 %		-		-		-			0.00 %		0.00 %		0.00 %	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan [983]	47.0 2 %			78.6 3 %		47.0 2 %		98.2 3 %		-		-		-			98.23 %		98.2 3 %		208. 91 %	
						Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah [1181]	100 %			99.4 1 %		100 %		99.6 4 %		-		-		-			99.64 %		99.6 4 %		99.6 4%	
7.01.02. 2.01						Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			15,375				15,04 0		10,50 0		-		-		-			10,5 00		10,50 0		68.29%
						Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan [1189]	6 Lem bag a			7 Lem bag a		6 Lem bag a		7 Lem bag a		-		-		-			7 Lemb aga		14 Lem bag a		233. 33 %	
7.01.02. 2.01.00 01						Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan			15,375				15.04 0		10.50 0		-		-		-			10.5 00		10.50 0		68,29%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait [2325]																					
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait [5527]	1 Lap oran		1 Lap oran		1 Lap oran		1 Lap oran	-	-	-	-	1 Lap oran		2 Lap oran		100.00 %					
7.01.02.2.02						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		9,569,468			184,246	22,374	-	-	-	-		22,374		22,374		0.23%					
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan [1239]	749 Lem bag a		751 Lem bag a		751 Lem bag a		751 Lem bag a	-	-	-	-	751 Lem bag a		1502 Lem bag a		200.53 %					
7.01.02.2.02.003						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah		9,569,468			184.246	22.374	-	-	-	-		22.374		22.374		0,23%					

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Kecamatan [2430]																					
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan [5533]	12 Lap oran		12 Lap oran		12 Lap oran		2 Lap oran		-		-		-		2 Laporan		14 Lap oran		100.00 %		
7.01.02.2.04						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		36,177				29,012		0		-		-		-		0		0		0.00%	
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat [2045]	1 Bida ng Urusan		1 Bida ng Urusan		1 Bida ng Urusan		1 Bida ng Urusan		-		-		-		1 Bida ng Urusa n		2 Bida ng Urusan		200.00 %		
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat [2046]	6 Bida ng Urusan		6 Bida ng Urusan		6 Bida ng Urusan		0 Bida ng Urusan		-		-		-		0 Bida ng Urusa n		6 Bida ng Urusan		100.00 %		
						Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat [1547]	1 Bida ng Urusan		1 Bida ng Urusan		1 Bida ng Urusan		1 Bida ng Urusan		-		-		-		1 Bida ng Urusa n		2 Bida ng Urusan		200.00 %		
7.01.02.2.04.003						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan		12,059				10.800		0		-		-		-		0		0		0,00%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [2347]																					
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan [5528]	4 Lap oran		4 Lap oran		4 Lap oran	0 Lap oran	-		-		-		0 Laporan		4 Lap oran		100.00 %				
7.01.02.2.04.0002						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan [2366]		12,059			11.778	0	-		-		-		0		0		0,00%				
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan [5530]	12 Lap oran		12 Lap oran		12 Lap oran	2 Lap oran	-		-		-		2 Laporan		14 Lap oran		100.00 %				
7.01.02.2.04.0001						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha [2357]		12,059			6.434	0	-		-		-		0		0		0,00%				
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan [5529]	48 Dok ume n		192 Dok ume n		48 Dok ume n	32 Dok ume n	-		-		-		32 Doku men		224 Dok ume n		400.00 %				
7.01.03						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		52,993,124		30,480,403		30,860,325	1,584,543	-		-		-		1,584,543		1,584,543		2,99%			

Kode	Sasa ran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan			Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
												K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3			4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi [1581]	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %	-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %		
					Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi [1018]	100 %		62.50 %		87.5 %		0.00 %	-		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00 %		
7.01.03.2.02				Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			52,633,656				30,580,221		1,581,243	-		-		-		1,581,243		1,581,243		3.00%	
					Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya [1244]	2 kelurahan		2 kelurahan		2 kelurahan		0 kelurahan	-		-		-		0 kelurahan		2 kelurahan		100.00 %		
					jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi [2118]	8 kelurahan		8 kelurahan		8 kelurahan		0 kelurahan	-		-		-		0 kelurahan		8 kelurahan		100.00 %		
7.01.03.2.02.0002				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [2851]			4,011,339				2.104.868		0	-		-		-		0		0		0,00%	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5535]	7 Unit		9 Unit		7 Unit		0 Unit	-		-		-		0 Unit		9 Unit		128.57 %		
7.01.03.2.02.0002				Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [2853]			4,869,453				1.398.771		0	-		-		-		0		0		0,00%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5536]	11 Unit		11 Unit		11 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		11 Unit		100.00 %	
7.01.03.2.02.00 02							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [2854]		4,861,720			2.578 .174		0		-		-		-		0		0		0,00%	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5537]	8 Unit		8 Unit		8 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		8 Unit		100.00 %	
7.01.03.2.02.00 02							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [2867]		4,423,557			2.404 .977		0		-		-		-		0		0		0,00%	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5538]	12 Unit		13 Unit		12 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		13 Unit		108.33 %	
7.01.03.2.02.00 02							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [2870]		5,176,870			3.399 .689		0		-		-		-		0		0		0,00%	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5539]	11 Unit		11 Unit		11 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		11 Unit		100.00 %	
7.01.03.2.02.00 02							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [2871]		4,656,137			2.577 .157		0		-		-		-		0		0		0,00%	

Kode	Sasa ran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5540]	11 Unit		11 Unit		11 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		11 Unit		100.00 %	
7.01.03.2.02.00 02							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [2872]		3,738,431			2.190 .424		0		-		-		-		0		0		0,00%	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5541]	9 Unit		1 Unit		9 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		1 Unit		11.1 1%	
7.01.03.2.02.00 02							Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan [2873]		4,339,186			3.736 .783		0		-		-		-		0		0		0,00%	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun [5542]	9 Unit		9 Unit		9 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		9 Unit		100.00 %	
7.01.03.2.02.00 03							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [2879]		1,062,865			977.9 14		156.2 87		-		-		-		156. 287		156.2 87		14,70%	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5543]	2 Pok mas / Orm as		2 Pok mas / Orm as		2 Pok mas / Orm as		0 Pok mas / Orm as		-		-		-		0 Pokm as / Orma s		2 Pok mas / Orm as		100.00 %	
7.01.03.2.02.00 03							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [2880]		2,224,080			1.554 .119		222.6 91		-		-		-		222. 691		222.6 91		10,01%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5544]	3 Pok mas / Ormas		3 Pok mas / Ormas		3 Pok mas / Ormas		0 Pok mas / Ormas		-		-		-		0 Pokmas / Ormas		3 Pok mas / Ormas		100.00 %	
7.01.03.2.02.0003							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [2881]		2,456,023			1.338.560		210.334		-		-		-		210.334		210.334		8,56%	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5545]	2 Pok mas / Ormas		1 Pok mas / Ormas		2 Pok mas / Ormas		0 Pok mas / Ormas		-		-		-		0 Pokmas / Ormas		1 Pok mas / Ormas		50.00%	
7.01.03.2.02.0003							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [2882]		1,675,032			1.335.100		195.076		-		-		-		195.076		195.076		11,65%	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5546]	2 Pok mas / Ormas		2 Pok mas / Ormas		2 Pok mas / Ormas		0 Pok mas / Ormas		-		-		-		0 Pokmas / Ormas		2 Pok mas / Ormas		100.00 %	
7.01.03.2.02.0003							Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [2883]		2,427,230			1.585.483		257.780		-		-		-		257.780		257.780		10,62%	
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5547]	2 Pok mas / Ormas		2 Pok mas / Ormas		2 Pok mas / Ormas		0 Pok mas / Ormas		-		-		-		0 Pokmas / Ormas		2 Pok mas / Ormas		100.00 %	

Kode	Sasa ran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(00 0)	K	Rp.(00 0)	K	Rp.(00 0)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9	10		11		12=8+9+10+1 1		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
7.01.03. 2.02.00 03						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [2884]			2,685,781				1.409 .061		225.7 22		-		-		-		225. 722		225.7 22		8,40%
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5548]		3 Pok mas / Orm as		3 Pok mas / Orm as		3 Pok mas / Orm as		0 Pok mas / Orm as		-		-		-		0 Pokm as / Orma s		3 Pok mas / Orm as		100. 00 %	
7.01.03. 2.02.00 03						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [2885]			1,357,204				821.1 81		129.3 13		-		-		-		129. 313		129.3 13		9,53%
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5549]		2 Pok mas / Orm as		1 Pok mas / Orm as		2 Pok mas / Orm as		0 Pok mas / Orm as		-		-		-		0 Pokm as / Orma s		1 Pok mas / Orm as		50.0 0%	
7.01.03. 2.02.00 03						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [2886]			2,667,073				1.160 .960		184.0 40		-		-		-		184. 040		184.0 40		6,90%
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan [5550]		2 Pok mas / Orm as		2 Pok mas / Orm as		2 Pok mas / Orm as		0 Pok mas / Orm as		-		-		-		0 Pokm as / Orma s		2 Pok mas / Orm as		100. 00 %	
7.01.03. 2.02.00 01						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan [2844]			1,675				7.000		0		-		-		-		0		0		0,00%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)		
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)							
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan [5534]	6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan	0 Lembaga Kemasyarakatan		-		-		-		-		0 Lembaga Kemasyarakatan		6 Lembaga Kemasyarakatan		100.00 %	
7.01.03.2.03							Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		359,468			280,104		3,300		-		-		-			3,300		3,300		0.92%	
							Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi [2242]	150 pelaku usaha		150 pelaku usaha		150 pelaku usaha	0 pelaku usaha		-		-		-		-		0 pelaku usaha		150 pelaku usaha		100.00 %	
							Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan [2287]	78 Lembaga		78 Lembaga		78 Lembaga	0 Lembaga		-		-		-		-		0 Lembaga		78 Lembaga		100.00 %	
7.01.03.2.03.0004							Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat [3267]		31,822			31.128		3.300		-		-		-			3.300		3.300		10,37%	
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat [5551]	4 Laporan		4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan		-		-		-		-		0 Laporan		4 Laporan		100.00 %	
7.01.03.2.03.0003							Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan [4690]		327,645			248.976		0		-		-		-			0		0		0,00%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan [6873]	78 Unit		78 Unit		78 Unit		0 Unit		-		-		-		0 Unit		78 Unit		100.00 %	
7.01.04						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			316,157		246,407		285,407		61,984		-		-		-		61,984		61,984		19,61%
						Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan [1392]	100 %			100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %	
7.01.04.2.01						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			316,157				285,407		61,984		-		-		-		61,984		61,984		19.61%
						Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan [1700]	17 lokasi			17 lokasi		17 lokasi		17 lokasi		-		-		-		17 lokasi		34 lokasi		200.00 %	
7.01.04.2.01.0001						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan [3270]			316,157				285.407		61.984		-		-		-		61.984		61.984		19,61%

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
							Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan [5552]	12 Lap oran		12 Lap oran		12 Lap oran		2 Lap oran		-		-		-		2 Laporan		14 Lap oran		100.00 %	
7.01.05						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			61,515		45,760		42,625		5,366		-		-		-		5,366		5,366		8,72%
						Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan [1393]	100 %			100.00 %		100 %		100.00 %		-		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %	
7.01.05.2.01						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			61,515				42,625		5,366		-		-		-		5,366		5,366		8.72%
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtib mas [1701]	2 kasus			12 kasus		2 kasus		2 kasus		-		-		-		2 kasus		14 kasus		700.00 %	
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional [2047]	2 Topik			2 Topik		2 Topik		0 Topik		-		-		-		0 Topik		2 Topik		100.00 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2025 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2025 (%)	
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3					4	5		6		7		8		9	10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%		
7.01.05.2.01.00.02						Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional [3271]			33,671				20.560		0		-		-		-		0		0		0,00%
						Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional [5553]		663 Orang		310 Orang		663 Orang		0 Orang		-		-		-		0 Orang		310 Orang		46.76%	
7.01.05.2.01.00.05						Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan [3272]			27,844				22.065		5.366		-		-		-		5.366		5.366		19,27%
						Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan [5554]		12 Laporan		12 Laporan		12 Laporan		2 Laporan		-		-		-		2 Laporan		14 Laporan		100.00%	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan OPD

Kecamatan Tambaksari sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan pelayanan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagai berikut :

1. Pelayanan kependudukan diwujudkan dalam bentuk pemberian surat-surat kependudukan seperti KK, KTP dan surat-surat keterangan lainnya.
2. Kegiatan IMB dengan menerbitkan rekomendasi pengurusan IMB.
3. Sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai pengelolaan sampah mandiri pada masyarakat.
4. Kegiatan penanggulangan kemiskinan melalui laporan dan monitoring data penduduk miskin.
5. Pembinaan PKK di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan mengadakan pelatihan-pelatihan bagi ibu-ibu dan kader PKK.
6. Pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan menampung aspirasi masyarakat dari bawah.
7. Pengawasan dan penegakan Peraturan Daerah berupa penertiban bangunan liar, pemasangan relame liar, PKL, dll.
8. Pembinaan dan monitoring pelaksanaan administrasi Kelurahan, RW dan RT.
9. Peningkatan sarana dan prasarana kantor untuk peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
10. Wawasan Kebangsaan

2.2.1 Analisis kondisi dan rencana tata ruang wilayah

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Surabaya tahun 2014 – 2034 bahwa Kecamatan Tambaksari termasuk dalam :

1. Pusat Lingkungan pada Unit Pengembangan IV Dharmahusada, dengan pusat unit pengembangan di kawasan Karang Menjangan;
2. Fungsi kegiatan utama Pusat Lingkungan pada Unit Pengembangan IV Dharmahusada meliputi permukiman, perdagangan, pendidikan dan kesehatan
3. Kawasan rawan bencana kebakaran dengan tingkat kerawanan sangat tinggi
4. Pengembangan perumahan dan pemukiman kepadatan sedang
5. Pengembangan sarana pendidikan tinggi

2.2.2 Analisis kondisi kewilayahan dan kependudukan

Kantor Kecamatan Tambaksari terletak di jalan Mendut No. 7 Surabaya Nomor Telp. (031) 5032003 luas area 950 M2, luas bangunan 596 M2 status tanah milik Negara.

Kecamatan Tambaksari berada di wilayah Kota Surabaya Propinsi Jawa Timur memiliki Luas Wilayah: $\pm$ 909,348 Ha dan memiliki letak geografis yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kecamatan Bulak dan Kecamatan Kenjeran
- Sebelah Selatan : Kecamatan Gubeng
- Sebelah Barat : Kecamatan Genteng dan Kecamatan Gubeng
- Sebelah Timur : Kecamatan Mulyorejo

Kecamatan Tambaksari secara administratif terbagi dalam 8 (delapan) kelurahan, yaitu : Kelurahan Tambaksari, Kelurahan Ploso, Kelurahan Gading, Kelurahan Pacarkembang, Kelurahan Rangkah, Kelurahan Pacarkeling, Kelurahan Kapasmadya Baru dan Kelurahan Dukuh Setro.

Penduduk Kecamatan Tambaksari pada Tahun 2023 berjumlah 227.025 jiwa, yang terbagi dalam 8 (delapan) Kelurahan yang meliputi 665 RT dan 78 RW, dengan latar belakang suku, budaya, pendidikan, agama, mata pencaharian yang berbeda-beda. Penduduk Kecamatan Tambaksari memiliki mata pencaharian antara lain di bidang perdagangan, jasa.

Kecamatan Tambaksari merupakan kawasan perkampungan, perdagangan dan industri kecil yang terdiri dari pertokoan besar dan kecil. Keadaan perekonomian di wilayah Kecamatan Tambaksari sangat variatif, mengingat strata ekonomi masyarakat diwilayah Kecamatan Tambaksari bersifat heterogen dan juga wawasan dan SDM nya ada yang terbatas. Namun dengan adanya lembaga-lembaga yang mengelola program bantuan Pemerintah yang ada di wilayah Kecamatan Tambaksari, sedikit banyak sudah membantu meningkatkan perekonomian masyarakat di Kecamatan Tambaksari.

Luas Wilayah

No.	Kelurahan	Luas
1.	Tambaksari	63 Ha
2.	Pacarkeling	70 Ha
3.	Ploso	148.5 Ha
4.	Rangkah	70 Ha
5.	Pacarkembang	209,343 Ha
6.	Gading	158 Ha
7.	Dukuh Setro	79 Ha
8.	Kapasmadya Baru	112 Ha

Jumlah Penduduk

No.	Kelurahan	Jumlah
1.	Tambaksari	19.481
2.	Pacarkeling	22.114
3.	Ploso	35.034
4.	Rangkah	16.932
5.	Pacarkembang	39.924
6.	Gading	30.762
7.	Dukuh Setro	23.108
8.	Kapasmadya Baru	39.679
	Jumlah	227.025

Jumlah RT, RW LPMK

NO	KELURAHAN	RT	RW	LPMK
1.	Tambaksari	77	9	1
2.	Pacarkeling	78	12	1
3.	Ploso	98	11	1
4.	Rangkah	50	9	1
5.	Pacarkembang	112	11	1
6.	Gading	94	11	1
7.	Dukuh Setro	64	7	1
8.	Kapasmadya Baru	92	8	1
	JUMLAH	665	78	8

2.2.3 Analisis terkait tugas dan fungsi pelayanan OPD

Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kota Surabaya dan Perwali Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 bahwa Kecamatan dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Dari gambar Struktur Organisasi Kecamatan Tambaksari, bahwa Kecamatan dipimpin oleh seorang CAMAT, yang dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari dibantu oleh:

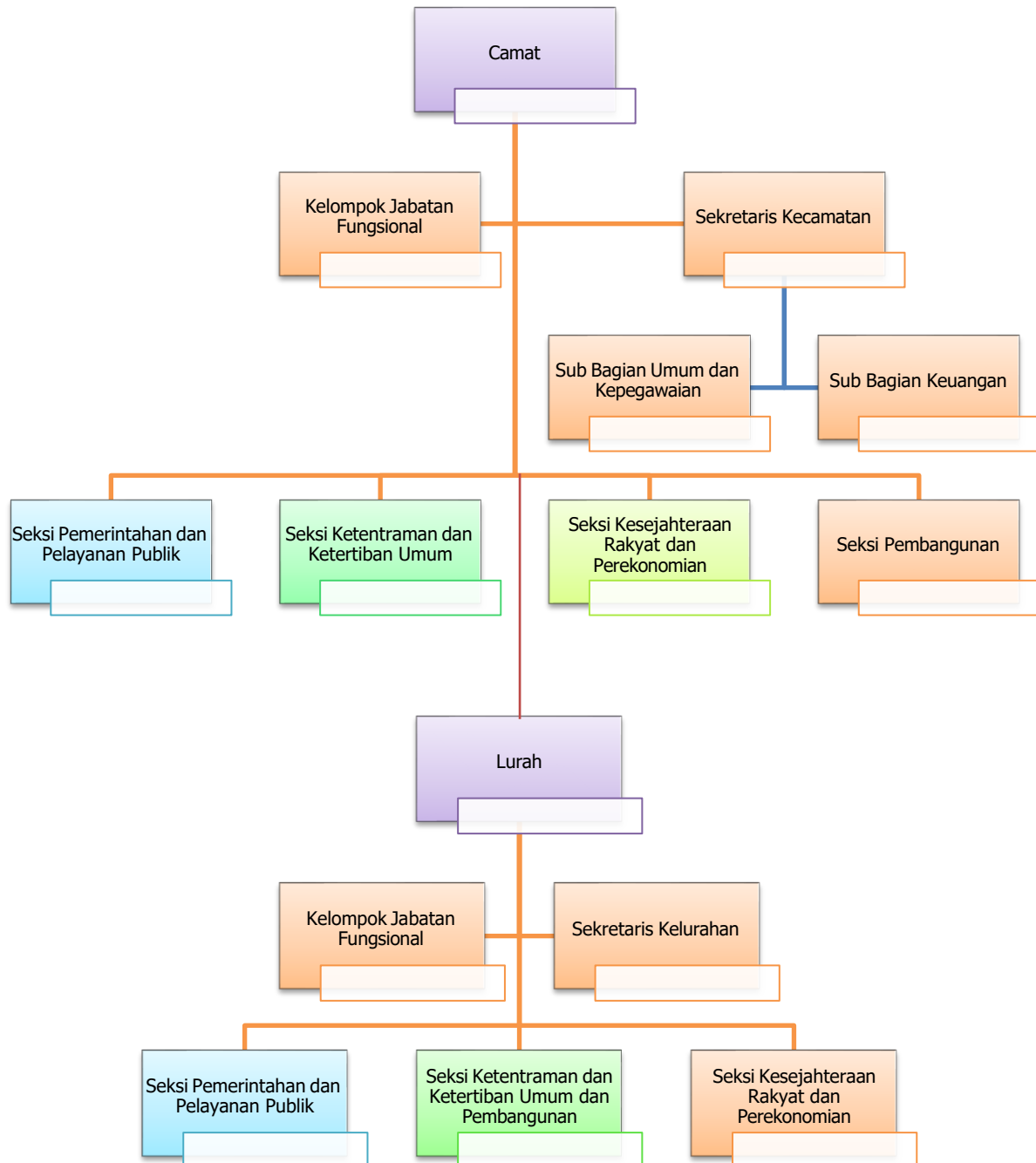
1. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh :

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Kepala Sub Bagian Keuangan

2. Kepala Seksi Pemerintahan
3. Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat
4. Kepala Seksi Ketrentaman dan Ketertiban Umum
5. Kepala Seksi Perekonomian
6. Kepala Seksi Pembangunan
7. Lurah, yang terdiri dari 8 (delapan), yaitu :
 - a. Lurah Tambaksari
 - b. Lurah Pacar Keling
 - c. Lurah Ploso
 - d. Lurah Rangkah
 - e. Lurah Pacar Kembang
 - f. Lurah Gading
 - g. Lurah Dukuh Setro
 - h. Lurah Kapas Madya Baru

SUSUNAN ORGANISASI KECAMATAN TAMBAKSARI



Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi Kecamatan Kota Surabaya, Camat mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Untuk melaksanakan kewenangan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada camat guna pelaksanaan tugas dan fungsi di wilayah kerja kecamatan, diperlukan adanya penjabaran tugas dan fungsi. Penjabaran tugas dan fungsi Kecamatan diatur dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor : 94 Tahun 2021 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Kecamatan. Untuk lebih jelasnya penjabaran tugas dan fungsi kecamatan adalah sebagaimana tersebut di bawah ini.

a. Camat

Dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat, dan Kelurahan mempunyai tugas:

- menyelenggarakan urusan pemerintahan umum
- mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat
- mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- mengkoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota
- mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum
- mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan
- membina dan mengawasi kegiatan di Kelurahan
- melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja daerah yang ada di Kecamatan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya

Untuk menyelenggarakan tugas dimaksud sebagaimana, dijelaskan di atas, Camat mempunyai fungsi :

- Penyusunan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan rencana program dan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, berkaitan dengan pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan tugas;
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ;
- Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya

b. Sekretaris Kecamatan

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang kesekretariatan. Untuk pelaksanaan tugas dimaksud, Sekretaris Kecamatan mempunyai fungsi:

- pelaksanaan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di bidang sekretariat;
- pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;

- pelaksanaan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan dan penanganan masalah hukum;
- pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan berbasis gender dan risiko;
- pelaksanaan koordinasi penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- pelaksanaan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
- pelaksanaan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- pelaksanaan pengelolaan keuangan;
- pelaksanaan pengelolaan data dan informasi;
- pelaksanaan koordinasi pelaporan indikator kinerja Perangkat Daerah;
- pelaksanaan pengawasan dan pengendalian di Sekretariat;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja Sekretariat yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud, Sekretaris Kecamatan dibantu oleh, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Kepala Sub Bagian Keuangan, dengan rician tugas dan fungsi sebagai berikut :

b. 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan di bidang Umum dan Kepegawaian antara lain :

- ✓ menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di sub bagian umum dan kepegawaian;
- ✓ menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian;
- ✓ menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- ✓ melaksanakan koordinasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
- ✓ melaksanakan koordinasi penanganan masalah hukum;
- ✓ melaksanakan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja berbasis gender dan risiko;
- ✓ melaksanakan koordinasi penyusunan perjanjian kinerja dan/atau Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- ✓ melaksanakan koordinasi pemantauan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- ✓ melaksanakan koordinasi pelaporan tindak lanjut penyelesaian rekomendasi hasil pengawasan;
- ✓ melaksanakan pengusulan peningkatan kompetensi pegawai;
- ✓ melaksanakan pemutakhiran data pegawai;

- ✓ melaksanakan pengusulan kenaikan pangkat dan gaji berkala;
- ✓ melaksanakan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- ✓ melaksanakan penilaian kinerja pegawai;
- ✓ melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- ✓ melaksanakan perencanaan kebutuhan Barang Milik Daerah;
- ✓ melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana perkantoran;
- ✓ melaksanakan inventarisasi dan pemeliharaan Barang Milik Daerah;
- ✓ melaksanakan distribusi sarana prasarana perkantoran;
- ✓ melaksanakan pengusulan pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- ✓ melaksanakan penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
- ✓ menyampaikan informasi kepada pemangku kepentingan;
- ✓ memberikan pelayanan protokoler;
- ✓ melaksanakan koordinasi penyusunan/peninjauan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- ✓ melaksanakan peninjauan penerapan tugas dan fungsi organisasi;
- ✓ melaksanakan koordinasi penyusunan/peninjauan proses bisnis, prosedur operasional standar dan standar pelayanan;
 - melaksanakan koordinasi pengaduan dan tindak lanjut survei kepuasan masyarakat;
 - melaksanakan administrasi surat-menyurat;
 - melaksanakan koordinasi pengumpulan data;
 - melaksanakan analisis dan pelaporan data dan informasi;
 - melakukan integrasi sistem informasi;
 - melaksanakan koordinasi penyusunan Laporan Kinerja (LKj) dan/atau Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - melaksanakan pengawasan dan pengendalian di sub bagian umum dan kepegawaian;
 - menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
 - melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

b. 2. Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris Kecamatan di bidang Keuangan antara lain :

- ✓ menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di sub bagian keuangan;
- ✓ menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di sub bagian keuangan;
- ✓ menyiapkan bahan pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan lembaga dan instansi lain;
- ✓ melaksanakan koordinasi penyusunan anggaran/perubahan anggaran;
- ✓ melaksanakan pengendalian pembayaran/penerimaan;

- ✓ menyusun laporan keuangan;
- ✓ melaksanakan pengawasan dan pengendalian di sub bagian keuangan;
- ✓ menyiapkan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- ✓ melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kecamatan sesuai tugas dan fungsinya.

c. Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang pemerintahan antara lain :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- menyiapkan bahan program kerja dan petunjuk teknis di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
- melaksanakan pemantauan dan pengoordinasian di bidang pertanahan dan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- melaksanakan fasilitasi dan pembinaan Organisasi Kemasyarakatan;
- melaksanakan administrasi kependudukan;
- melaksanakan administrasi pertanahan;
- melaksanakan fasilitasi administrasi pajak daerah dan retribusi;
- melaksanakan pemrosesan teknis perizinan/non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Seksi Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- Menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum

Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang ketentraman dan ketertiban umum antara lain :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- menyiapkan bahan program kerja dan petunjuk teknis di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
- membantu pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota;
- melaksanakan pemantauan dan pelaporandi bidang ketentraman dan ketertiban umum;

- melaksanakan pengawasan tanah/bangunan yang merupakan aset/Barang Milik Daerah di wilayah kerjanya;
- melaksanakan pengawasan perizinan bangunan di wilayah kerjanya;
- melaksanakan koordinasi penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat;
- melaksanakan deteksi dini di bidang penanggulangan bencana dan perlindungan masyarakat, serta ketentraman dan ketertiban umum;
- melaksanakan pemrosesan teknis perizinan /non perizinan yang menjadi kewenangan kecamatan;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

e. Seksi Kesejahteraan Masyarakat dan Perekonomian

Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang sosial dan pemberdayaan masyarakat antara lain :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian;
- menyiapkan bahan program kerja dan petunjuk teknis di Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
- melaksanakan fasilitasi pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- melaksanakan pemantauan dan pengoordinasian di bidang kesehatan, pendidikan, sosial, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan dan pariwisata, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, ketahanan pangan dan pertanian, koperasi dan usaha mikro, perdagangan, penanaman modal dan perindustrian, kelautan dan perikanan, tenaga kerja;
- melaksanakan pengoordinasian dan pemantauan pemberian bantuan sosial dari Pemerintah kepada keluarga miskin;
- melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program pemberdayaan ekonomi keluarga miskin;
- melaksanakan pemrosesan teknis perizinan /non perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Perekonomian;
- Menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

f. Seksi Pembangunan

Seksi Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Camat di bidang fisik dan prasarana. Untuk melaksanakan sebagian tugas dimaksud, Seksi Fisik Prasarana mempunyai fungsi :

- menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan petunjuk teknis di Seksi Pembangunan;
- menyiapkan bahan pelaksanaan program kerja dan petunjuk teknis di Seksi Pembangunan;
- menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain;
- melaksanakan monitoring, pemantauan dan pengoordinasian di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, lingkungan hidup, komunikasi dan informatika, perhubungan serta perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
- melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat Kecamatan;
- melaksanakan pemrosesan teknis perizinan /non perizinan yang menjadi kewenangan Kecamatan;
- melaksanakan pengawasan dan pengendalian di Seksi Pembangunan;
- Menyiapkan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kinerja yang tertuang dalam dokumen perencanaan strategis;
- melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

g. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan antara lain: auditor, perencana, pustakawan, asiparis dan pranata komputer.

2.2.4 Analisis SPM/IKK/Indikator lainnya

Kecamatan sebagai OPD penunjang dalam pencapaian indikator Kinerja Kota, maka diperlukan kegiatan yang sinergis. Seperti yang telah kami uraikan pada bab sebelumnya bahwa Indikator program kegiatan tahun 2025 Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya adalah meliputi:

1. Indikator Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan
2. Indikator Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
3. Indikator Penanggulangan Masalah Sosial
4. Indikator Peningkatan Kualitas Kehidupan dan Peran Perempuan serta kesejahteraan dan perlindungan anak
5. Indikator Peningkatan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil
6. Indikator Pengelolaan Kebersihan Kota
7. Indikator Penanggulangan Kemiskinan

Dengan 7 indikator tersebut diharapkan dapat memenuhi capaian 12 indikator dalam Standar Pelayanan Masyarakat.

2.2.5 Analisis kondisi pelayanan OPD

Perkembangan dan permasalahan yang terjadi di lingkungan Kecamatan Tambaksari sebagai gambaran dapatlah dijelaskan beberapa potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi di wilayah kerja Kecamatan Tambaksari baik secara internal maupun eksternal dan perlu mendapatkan penanganan segera melalui realisasi pelaksanaan program kegiatan. Permasalahan dan tantangan sebagaimana dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Kemiskinan Kota dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Permasalahan Kebersihan Lingkungan Perkotaan
3. Permasalahan Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat.
4. Permasalahan Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Publik
5. Permasalahan Aparatur, Kelembagaan Dan Tatalaksana.

2.2.5a Hal-hal positif yang sudah berhasil ditingkatkan oleh OPD

Dalam pencapaian Perubahan Renja tentu masih ada yang belum sempurna, oleh karenanya dalam Perubahan Renja mendatang akan ditingkatkan secara terus menerus. Dari pencapaian Perubahan Renja 2025 dapat kami simpulkan hal - hal sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Musrenbang RKPD tingkat Kecamatan.
- b. Meningkatnya Sistem Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam Lingkungan Masyarakat.
- c. Meningkatnya Kualitas Pelayanan dalam melayani warga masyarakat Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
- d. Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dalam Pelaksanaan Tugas di Kelurahan dan Kecamatan.
- e. Meningkatnya Kualitas Proteksi dan Terwujudnya Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- f. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik yang cepat, tepat, sederhana dan terjangkau Kepada Masyarakat dalam Bidang Kependudukan dan Izin Mendirikan Bangunan.
- g. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan
- h. Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang dan Jasa Perkantoran
- i. Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- j. Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Pendataan Kemiskinan.

2.2.5b Masalah dan tantangan yang dihadapi terkait pelayanan oleh OPD

Beberapa potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi di wilayah kerja Kecamatan Tambaksari baik secara internal maupun eksternal dan perlu mendapatkan penanganan segera melalui realisasi pelaksanaan program kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Kemiskinan Kota dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial :
 - a. Masih terdapatnya jumlah keluarga miskin;
 - b. Masih terdapatnya anak usia sekolah yang putus sekolah;
 - c. Masih terdapatnya pengangguran;
 - d. Rendahnya Tingkat Pemahaman Kesehatan;
 - e. Masih adanya tingkat Pendapatan Keluarga dibawah UMR .
2. Permasalahan Kebersihan Lingkungan Perkotaan:
 - a. Rendahnya Tingkat Kesadaran Terhadap Lingkungan yang bersih, dan sehat.
 - b. Terbatasnya Jumlah Kader Kebersihan Lingkungan yang tersedia.
 - c. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Penunjang Kebersihan Lingkungan Perkotaan.
 - d. Terbatasnya Sarana Sanitasi Lingkungan yang memadai.
3. Permasalahan Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat. :
 - a. Rendahnya Tingkat Pemahaman dan Kesadaran terhadap Peraturan Daerah
 - b. Tingginya Jumlah Angka Pelanggaran Peraturan Daerah.
 - c. Terbatasnya Jumlah Personil.
 - d. Terbatasnya Prasarana dan Sarana Penunjang Kegiatan.
 - e. Masih adanya tingkat urbanisasi yang tidak terkontrol.
4. Permasalahan Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Publik :
 - a. Terbatasnya Jumlah Personil.
 - b. Terbatasnya Jumlah SDM yang memadai.
 - c. Terbatasnya Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Publik yang memadai.
5. Permasalahan Aparatur, Kelembagaan Dan Tatalaksana.
 - a. Terbatasnya Jumlah Personil.
 - b. Terbatasnya Jumlah SDM yang memadai.
 - c. Terbatasnya Tingkat Pemahaman dan Kesadaran sebagai Aparat.
 - d. Terbatasnya Jumlah Prasarana dan Sarana Perkantoran yang memadai.
 - e. Terbatasnya Pemenuhan Tertib Administrasi dan Tatalaksana yang memadai.
 - f. Masih kurangnya tingkat kesejahteraan.

2.2.5c Kondisi/prediksi pelayanan OPD yang diharapkan ke depan

Sesuai dengan data dan uraian yang telah disampaikan sebelumnya, maka OPD Kecamatan Tambaksari berusaha untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang demokratis, berkeadilan dan transparan. Selain itu mewujudkan penataan lingkungan masyarakat Kecamatan Tambaksari yang bersih, hijau dan indah, mewujudkan lingkungan yang tertib dan kehidupan yang tentram serta meningkatkan Kesejahteraan masyarakat melalui Pembangunan Sosial Masyarakat dan Peran perempuan serta perlindungan anak.

Dari hal – hal tersebut proyeksi pelayanan ke depan dapat kami rumuskan sebagai berikut:

- a. Terwujudnya Monitoring Dan Penyelenggaraan Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan.
- b. Terlaksananya Penyusunan Dan Evaluasi Perencanaan strategis.
- c. Terciptanya Pengawasan Pengendalian dan Evaluasi Kegiatan Polisi Pamong Praja.
- d. Terlaksananya Sosialisasi Wawasan Kebangsaan.
- e. Terwujudnya Monitoring Pendataan PMKS Dan PSKS.
- f. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Rangkah
- g. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Gading
- h. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Dukuh Setro
- i. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Kapas Madya Baru
- j. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Pacar Keling
- k. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Pacar Kembang
- l. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Ploso
- m. Terwujudnya Kegiatan Operasional Kelurahan Tambaksari
- n. Terwujudnya Kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak.
- o. Terwujudnya Kegiatan Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan.
- p. Terlaksananya Kegiatan Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan Dan Lingkungan.
- q. Terlaksananya Kegiatan Penyediaan Barang Dan Jasa Perkantoran.
- r. Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana Dan Prasarana Perkantoran.
- s. Terlaksananya Kegiatan Monitoring Dan Validasi Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- t. Terlaksananya Monitoring dan Pendataan Harga Bahan Pokok dan UMKM

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan analisis gambaran pelayanan OPD, kajian hasil evaluasi pelaksanaan OPD, serta kajian terhadap pencapaian kinerja Renstra dan OPD, maka dapat dirumuskan isu-isu penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD. Sebagai gambaran perkiraan dapatlah dijelaskan beberapa potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi di wilayah kerja Kecamatan Tambaksari baik secara internal maupun eksternal dan perlu mendapatkan penanganan segera melalui realisasi pelaksanaan program kegiatan. Permasalahan dan tantangan sebagaimana dikemukakan di atas adalah sebagai berikut :

1. Permasalahan Kemiskinan Kota dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.
 - a. Masih adanya jumlah keluarga miskin;
 - b. Masih adanya jumlah anak usia sekolah yang putus sekolah;
 - c. Tingginya jumlah pengangguran;
 - d. Rendahnya tingkat pemahaman kesehatan;
 - e. Masih adanya tingkat pendapatan keluarga dibawah standar.
2. Permasalahan Kebersihan Lingkungan Perkotaan
 - a. Rendahnya tingkat kesadaran terhadap lingkungan yang bersih dan sehat;
 - b. Terbatasnya jumlah kader kebersihan lingkungan yang tersedia;
 - c. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang kebersihan lingkungan perkotaan;
 - d. Terbatasnya sarana sanitasi lingkungan yang memadai.
3. Permasalahan penegakan hukum dan kesadaran hukum masyarakat.
 - a. Rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran terhadap Peraturan Daerah;
 - b. Tingginya jumlah angka pelanggaran Peraturan Daerah.
 - c. Terbatasnya jumlah personil;
 - d. Terbatasnya prasarana dan sarana penunjang kegiatan;
 - e. Tingginya tingkat urbanisasi yang tidak terkontrol.
4. Permasalah pelayanan kependudukan dan pelayanan publik
 - a. Terbatasnya jumlah personil;
 - b. Terbatasnya jumlah SDM yang memadai;
5. Permasalahan Aparatur, Kelembagaan Dan Tatalaksana.
 - a. Terbatasnya Jumlah Personil.
 - b. Terbatasnya Jumlah SDM yang memadai.
 - c. Terbatasnya Tingkat Pemahaman dan Kesadaran sebagai Aparat.
 - d. Terbatasnya Jumlah Prasarana dan Sarana Perkantoran yang memadai.
 - e. Terbatasnya Pemenuhan Tertib Administrasi dan Tata laksana yang memadai.
 - f. Masih kurangnya tingkat kesejahteraan.

Isu – isu diatas perlu adanya perubahan hal ini sejalan dengan visi dan misi Kota . Maka tantangan dan isu tersebut harus dijadikan peluang untuk meningkatkan pembangunan di wilayah Kecamatan Tambaksari. Pembangunan di sini juga berarti meningkatkan kesejahteraan masyarakat demikian juga dengan aparatur pelayanan publik. Tingkat pendidikan yang masih rendah perlu ditingkatkan, karena peningkatan sumber daya manusia merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Demikian juga dengan ketertiban masyarakat yang masih perlu ditingkatkan.

2.3.1 Tingkat Kinerja OPD

Sebagaimana beberapa permasalahan dan tantangan pencapaian target kinerja di tahun 2024 yang menunjukkan tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan program kegiatan, di Tahun 2025 diharapkan perkiraan target kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Tambaksari Kota Surabaya melalui rencana kerja yang tertuang dalam dokumen

rencana kinerja dan anggaran dapat meminimalisir bahkan menjawab secara tuntas berbagai permasalahan dan tantangan yang terjadi dan merupakan hambatan dalam mewujudkan visi, misi, yang diimplementasikan melalui tujuan dan sasaran organisasi yang telah ditetapkan. Beberapa potensi permasalahan dan tantangan yang dihadapi di wilayah kerja Kecamatan Tambaksari baik secara internal maupun eksternal dan perlu mendapatkan penanganan segera melalui realisasi pelaksanaan program kegiatan, hal ini telah kami jelaskan sebelumnya. Oleh karenanya hal – hal tersebut secara terus menerus perlu ditingkatkan.

Dari data Perubahan Renja maupun Renstra 2021 s.d. 2026 dapat disimpulkan bahwa pencapaian target kinerja dapat terpenuhi. Walau demikian dengan perkembangan era globalisasi apalagi dalam era MEA, perlu disesuaikan baik program maupun kegiatan.

2.3.2 Permasalahan dan Hambatan

Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD sama seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bahwa isu – isu perkembangan pembangunan setiap tahun hampir sama hanya kuantitas dan kualitas yang berubah antara lain:

1. Permasalahan Kemiskinan Kota dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
2. Permasalahan Kebersihan Lingkungan Perkotaan
3. Permasalahan Penegakan hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat.
4. Permasalahan Pelayanan Kependudukan Dan Pelayanan Publik
5. Permasalahan Aparatur, Kelembagaan Dan Tatalaksana.

Adapun hambatan yang terdapat dalam pencapaian target kinerja adalah sebagai berikut:

1. Masih kurangnya pemahaman masyarakat dan aparatur tentang pendidikan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, kesadaran hukum dan sebagainya, hal ini berkaitan dengan peningkatan SDM.
2. Masih kurangnya sarana prasarana pendidikan, lingkungan hidup, pemenuhan tertib administrasi dan sebagainya, hal ini berkaitan dengan SDA dan infrastuktur.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Adapun peluang dan tantangan OPD dalam meningkatkan pelayanan ke depan dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal adalah sebagai berikut :

Faktor Internal :

1. Kekuatan / Pendukung / Strength
 - a. Kompetensi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil.
 - b. Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Kecamatan.
 - c. Standart Operasional Prosedur (SOP) Kerja non pelayanan dan pelayanan.
 - d. Jumlah dan Kualitas Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan.
 - e. Database PMKS, PSKS, Gender, Gakin, UMKM, Koperasi, PKL, Kependudukan, dll.
2. Kelemahan / Penghambat / Weakness
 - a. Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil (PNS) Kecamatan.
 - b. Motivasi Kerja Pegawai.

- c. Perilaku Kerja Pegawai.
- d. Hubungan Kerja Pegawai.
- e. Pembinaan Pegawai Secara berkala dan berjenjang di Kecamatan dan Kelurahan.

Faktor Eksternal :

1. Peluang / Opportunities
 - a. Partisipasi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat.
 - b. Ketertiban Masyarakat dalam Kegiatan Masyarakat.
 - c. Kesadaran Masyarakat terhadap Peraturan Perundang – Undangan.
 - d. Koordinasi dan Intervensi OPD dan Jajaran Samping dalam menindak lanjuti kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan.
 - e. Penggunaan dan Pemanfaatan Sarana TI.
2. Ancaman / Threats
 - a. Arus Urbanisasi yang tidak potensial.
 - b. Demografi atau pertumbuhan penduduk.
 - c. Luas Wilayah cakupan titik sasaran penertiban.
 - d. Pertumbuhan PKL secara musiman pada kawasan tertentu.
 - e. Angka Usia Kerja Produktif dan Angka Usia Harapan Hidup.

2.3.4 Isu-Isu Penting/Strategis Pelayanan OPD

Berdasarkan penjabaran isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD di atas, dapat disimpulkan isu-isu strategis pelayanan OPD adalah sebagai berikut

1. Dukungan prasarana perlu mendapatkan prioritas penanganan guna mengantisipasi tingginya minat masyarakat guna melakukan dan mendapatkan pelayanan di segala bidang.
2. Dukungan kesejahteraan pegawai perlu mendapatkan prioritas penanganan guna meningkatkan semangat kerja dan kinerja pengelolaan OPD.
3. Dukungan SDM dalam jumlah yang cukup dan berkualitas serta sarana-sarana pemberian pelayananyang memadai akan menguatkan daya saing Kecamatan Tambaksari dalam hal berkompetisi dengan Kecamatan lain.

Dengan demikian, strategi yang dapat diterapkan sebagai faktor kunci keberhasilan antara lain:

1. Meningkatkan kelengkapan prasarana fisik Kecamatan Tambaksari
2. Meningkatkan Kesejahteraan Pegawai
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM serta sarana pemberian pelayanan.
4. Mewujudkan Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan sesuai peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2008 memang membutuhkan komitmen yang kuat, tetapi ini merupakan tuntutan Reformasi Birokrasi didalam mewujudkan *Millenium Development Goals* (MDGs)

BAB III

RENCANA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Program dan kegiatan

3.1.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Kota Surabaya

Visi dan misi merupakan gambaran apa yang ingin dicapai Kota Surabaya pada akhir periode kepemimpinan walikota dan wakil walikota terpilih, yaitu:

Visi Kepala Daerah Kota Surabaya :

"GOTONG ROYONG MENUJU KOTA DUNIA YANG MAJU,
HUMANIS, DAN BERKELANJUTAN"

Dalam rangka mewujudkan visi pembangunan Kota Surabaya yang telah ditetapkan, maka ditetapkan misi pembangunan Kota Surabaya tahun 2021-2026 yakni sebagai berikut :

1. Mewujudkan perekonomian inklusif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan pembukaan lapangan kerja baru melalui penguatan kemandirian ekonomi lokal, kondusifitas iklim investasi, penguatan daya saing Surabaya sebagai pusat penghubung perdagangan dan jasa antar pulau serta internasional
2. Membangun Sumber Daya Manusia (SDM) unggul, sehat jasmani dan rohani, produktif serta berkarakter melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya
3. Memantapkan penataan ruang kota yang terintegrasi melalui ketersediaan infrastruktur dan utilitas kota yang modern berkelas dunia serta berkelanjutan
4. Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik
5. Menciptakan ketertiban, keamanan, kerukunan sosial dan kepastian hukum yang berkeadilan.

Dari 5 (lima) misi Kepala Daerah Kota Surabaya tersebut di atas, maka kecamatan diamanahkan untuk melaksanakan misi 4.

Adapun tujuan dan sasaran dari misi 4 adalah sebagai berikut :

Misi 4, dengan tujuan terselenggaranya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif dan inovatif dan sasaran, yaitu :

- a. Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah
- b. Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang efektif dan inovatif

3.1.2. Faktor-Faktor yang Menjadi Pertimbangan dalam Penetapan Program dan Kegiatan

Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan kecamatan dijabarkan sebagaimana dalam tabel pencapaian , kajian usulan program / kegiatan dari masyarakat dan penggabungan Prioritas masukan masyarakat serta dengan Perubahan Renja OPD terdahulu .

Bertolak pada Visi, Misi Tujuan dan Program yang dilaksanakan Kecamatan Sukolilo secara rasional akan menyentuh segala aspek dalam sebuah sistem organisasi, baik aspek internal (pemberi layanan = Petugas Pelayanan Kecamatan) maupun aspek eksternal (penerima layanan = masyarakat). Seperti dijelaskan dalam Program diatas, aspek eksternal yang dimaksud adalah masyarakat itu sendiri sebagai subyek sekaligus obyek dari pelayanan yang diberikan.

Apabila aspek internal dapat dicapai maka aspek eksternal akan secara otomatis tercapai. Kita analogikan seperti pelayanan yang terjadi dalam perusahaan swasta nasional maupun internasional, betapa petugas memberi layanan sangat bersahabat sekali sehingga penerima layanan merasa seperti raja, segala kebutuhan yang diinginkan penerima layanan dapat dengan cepat dan cermat dipenuhi oleh pemberi layanan.

3.1.3. Garis Besar Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kecamatan Tambaksari yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2025 sebagaimana tertera pada tabel 3.1

Kegiatan tersebut merupakan kegiatan pembangunan dan pemeliharaan sarana dan prasarana wilayah dengan pemberdayaan masyarakat dimasing-masing kelurahan dimana berisikan usulan-usulan musrenbang yang diakomodir pelaksanaannya di tahun anggaran 2025.

Program dan Kegiatan Kecamatan Tambaksari yang akan dilaksanakan pada Rencana Kerja Tahun 2025 terdiri dari:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Program ini memiliki indikator program persentase kegiatan yang terfasilitasi dengan target pada Tahun 2025 sebesar 97,91 % dengan nilai pagu Rp. 36.010.219.138,-

Adapun kegiatan pada Tahun 2025 yang menjadi penunjang program ini adalah sebagai berikut :

- a. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang merupakan Penyediaan gaji dan tunjangan ASN dengan nilai pagu Rp. 27.890.310.150,-
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah yang merupakan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan nilai pagu Rp. 7.919.410.848,-
- c. PemeliharaanBarang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan nilai pagu Rp. 200.498.140,-

2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan pelayanan Publik

Program ini memiliki indikator program persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi dengan target pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan nilai pagu Rp. 228.298.053,-.

Adapun kegiatan pada Tahun 2025 yang menjadi penunjang program ini adalah :

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan melalui Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait dengan nilai pagu Rp.15.039.594,-

- b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan melalui peningkatan efektifitas pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan Tambaksari dengan nilai pagu sebesar Rp. 184.246.400,-
- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat dengan sub kegiatan :
 - 1) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha dengan nilai pagu Rp.6.434.060,-
 - 2) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Non perizinan dengan nilai pagu Rp.11.777.999,-
 - 3) Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan dengan nilai pagu Rp. 10.800.000,-

3. Program pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan

Program ini memiliki indikator program persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang terfasilitasi dengan target pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan nilai pagu Rp. 30.882.999.216,-.

Adapun kegiatan pada Tahun 2025 yang menjadi penunjang program ini adalah Kegiatan:

- a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan dengan target pada Tahun 2025 sebanyak 78 lembaga dengan nilai pagu Rp. 302.778.300,-. dengan sub kegiatan :
 - 1) Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dengan nilai pagu Rp. 31.127.700,-
- b. Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dengan sub kegiatan :
 - 1) Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan dengan nilai pagu Rp. 7.000.000,-
 - 2) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dukuh Setro dengan nilai pagu Rp. 2,104,868,352,-
 - 3) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Gading dengan nilai pagu Rp. 1,398,770,772,-
 - 4) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Kapasmadya Baru dengan nilai pagu Rp. 2,635,854,290,-
 - 5) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pacarkeling dengan nilai pagu Rp. 2,448,466,437 ,-
 - 6) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Pacarkembang dengan nilai pagu Rp. 3,401,225,340 ,-
 - 7) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Ploso dengan nilai pagu Rp. 2,577,156,661,-
 - 8) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Rangkah dengan nilai pagu Rp. 2,190,424,011,-
 - 9) Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Tambaksari dengan nilai pagu Rp. 3,736,782,784,-

- 10) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Dukuh Setro dengan nilai pagu Rp. 977,914,413,-
 - 11) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Gading dengan nilai pagu Rp. 1,554,118,725,-
 - 12) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kapasmadya Baru dengan nilai pagu Rp. 1,280,880,000,-
 - 13) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pacarkeling dengan nilai pagu Rp. 1,291,610,560,-
 - 14) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pacarkembang dengan nilai pagu Rp. 1,583,946,880,-
 - 15) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Ploso dengan nilai pagu Rp. 1,409,060,800,-
 - 16) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Rangkah dengan nilai pagu Rp. 821,180,800,-
 - 17) Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Tambaksari dengan nilai pagu Rp. 1,160,960,091,-
- c. Salah satu gambaran rencana kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pemberdayaan masyarakat khususnya keluarga miskin dan/atau pra sejahtera melalui program padat karya di wilayah Kecamatan Tambaksari

4. Program Koordinasi Ketenteraman dan ketertiban Umum

Program ini memiliki indikator program persentase ketepatan pemenuhan sarana dan prasarana perkantoran dengan target pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan nilai pagu Rp. 285.406.800,-.

Adapun kegiatan pada Tahun 2025 yang menjadi penunjang program ini adalah Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan Tambaksari.

5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Program ini memiliki indikator program Presentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan dengan target pada Tahun 2025 sebesar 100% dengan nilai pagu Rp. 42.625.000,-.

Adapun kegiatan pada Tahun 2025 yang menjadi penunjang program ini adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan sub kegiatan :

- 1) Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dengan nilai pagu Rp.20.560.000,-
- 2) Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan nilai pagu Rp.22.065.000,-

Tabel 3.1
Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kec. Tambaksari
Tahun 2025

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
1	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,91 %	34,998,335,048	7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	97,91 %	36,010,219,138	
	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	27,937,694,430	7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %	27,890,310,150	
	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tambaksari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	27,937,694,430	7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Tambaksari	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80 Orang/bulan	27,890,310,150	
	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	6,860,142,478	7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %	7,919,410,848	
	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tambaksari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	6,860,142,478	7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Tambaksari	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket	7,919,410,848	
	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	200,498,140	7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %	200,498,140	
	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	200,498,140	7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50 Unit	200,498,140	
2	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	228,298,053	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %	228,298,053	
			Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %				Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		
			Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47,02 %				Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	47,02 %		

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	15,039,594	7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga	15,039,594	
	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15,039,594	7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 Laporan	15,039,594	
	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	751 Lembaga	184,246,400	7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan	751 Lembaga	184,246,400	
	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	184,246,400	7.01.02.2.02.0003 Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	184,246,400	
	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	29,012,059	7.01.02.2.04 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan	29,012,059	
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
			Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan				Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		
	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Kec. Tambaksari	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	6,434,060	7.01.02.2.04.0001 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan	Kec. Tambaksari	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	48 Dokumen	6,434,060	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelayanan Perizinan Non Usaha					Pelayanan Perizinan Non Usaha					
	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11,777,999	7.01.02.2.04.0002 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	12 Laporan	11,777,999	
	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10,800,000	7.01.02.2.04.0003 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	4 Laporan	10,800,000	
3	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindakanjuti konsep inovasi	87.5 %	30,860,324,616	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Persentase kelurahan yang menindakanjuti konsep inovasi	87.5 %	30,882,999,216	
			Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %				Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		
	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan	30,580,220,916	7.01.03.2.02 Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	2 kelurahan	30,580,220,916	
			jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan				jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	8 kelurahan		
	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7,000,000	7.01.03.2.02.0001 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kec. Tambaksari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	6 Lembaga Kemasyarakatan	7,000,000	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2,104,868,352	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Dukuh Setro	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	7 Unit	2,104,868,352	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gading	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	1,398,770,772	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Gading	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	4 Unit	1,398,770,772	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	8 Unit	2,578,174,290	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	3 Unit	2,635,854,290	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pacarkeling	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,404,976,837	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pacarkeling	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	12 Unit	2,448,466,437	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pacarkembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	3,399,688,924	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Pacarkembang	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	3,401,225,340	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ploso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2,577,156,661	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Ploso	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	11 Unit	2,577,156,661	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rangkah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,190,424,011	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Rangkah	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	2,190,424,011	
	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3,736,782,784	7.01.03.2.02.0002 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Kelurahan Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	9 Unit	3,736,782,784	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Duku Setro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	977,914,413	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Duku Setro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	977,914,413	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gading	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,554,118,725	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Gading	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,554,118,725	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,338,560,000	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Kapasmadya Baru	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,280,880,000	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pacarkeling	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,335,100,160	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pacarkeling	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,291,610,560	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pacarkembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,585,483,296	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Pacarkembang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,583,946,880	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ploso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	3 Pokmas / Ormas	1,409,060,800	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Ploso	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1,409,060,800	

No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rangkah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	821,180,800	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Rangkah	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	821,180,800	
	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambaksari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,160,960,091	7.01.03.2.02.0003 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kelurahan Tambaksari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	2 Pokmas / Ormas	1,160,960,091	
	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga	280,103,700	7.01.03.2.03 Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	78 Lembaga	302,778,300	
			Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha				Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	150 pelaku usaha		
	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	78 Unit	248,976,000	7.01.03.2.03.0003 Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan	78 Unit	271,650,600	
	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	31,127,700	7.01.03.2.03.0004 Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	4 Laporan	31,127,700	
4	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	285,406,800	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %	285,406,800	
	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi	285,406,800	7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	17 lokasi	285,406,800	
	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	285,406,800	7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	12 Laporan	285,406,800	
5	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN		Persentase penanganan potensi konflik tidak	100 %	42,625,000	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN		Persentase penanganan potensi konflik tidak	100 %	42,625,000	

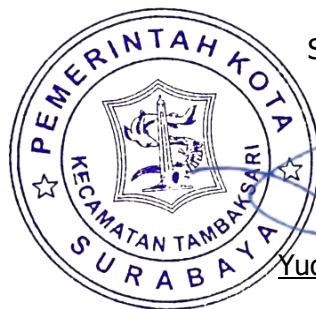
No	Sebelum Perubahan					Setelah Perubahan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		menjadi konflik di Kecamatan			URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		menjadi konflik di Kecamatan			
	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 kasus	42,625,000	7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas	2 kasus	42,625,000	
			Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik				Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 Topik		
	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tambaksari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	663 Orang	20,560,000	7.01.05.2.01.0002 Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Tambaksari	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	312 Orang	20,560,000	
	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	22,065,000	7.01.05.2.01.0005 Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kec. Tambaksari	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	12 Laporan	22,065,000	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Kecamatan Tambaksari Tahun 2025 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tambaksari pada tahun 2025 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Surabaya Tahun 2025.

Perubahan Renja Kecamatan Tambaksari Tahun 2025 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan sistem perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.



Surabaya,
Camat Tambaksari

Yudi Eko Handono, S.IP, M.IP.
Pembina
NIP 198106112006041018